

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)BPR AKASIA MAS
TAHUN 2023



bank akasia mas
PT. BPR AKASIA MAS

Ruko Mall WTC Serpong No.5829 & 5831 Jl. Raya Serpong, Pd.
Jagung, Serpong Utara 15326
TELEPON: 021-53163360

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan tata kelola yang baik pada sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat semakin dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya volume usaha dan semakin meningkat pula risikonya. Oleh karena itu penerapan tata kelola dimaksudkan untuk:

Melindungi pemangku kepentingan (stake holders), Meningkatkan kinerja bank dan Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola jugamencakup nilai- nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, sehingga diharapkan industri perbankan, khususnya BPR semakin dipercaya oleh masyarakat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Agus, SE,MM
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan/pengelolaan BPR.</p> <p>b. Telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Sahammelalui RUPS.</p> <p>c. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direktur Utama memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksinamun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>d. Telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti OJK danakuntan publik (KAP) yang ditunjuk atas persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>e. Direktur Utama mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabsebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelolayang baik (GCG)</p>			
2.	Nama	:	Anwar Musadad, SH
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan/ pengelolaan BPRkhususnya bidang marketing dan bisnis/usaha BPR.</p> <p>b. Telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti OJK danakuntan publik (KAP) yang ditunjuk atas persetujuan Dewan Komisaris terkait temuan bidang kredit dan marketing.</p> <p>c. Telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Sahammelalui RUPS.</p> <p>d. Membantu dan mendukung tugas- tugas Direktur Utama BPR dalam mengelola operasional BPR sehari-hari.</p>			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<p>a. Menindaklanjuti setiap hasil keputusan RUPS Tahunan yang telah ditetapkan terkaitdengan pengelolaan dan operasional BPR</p> <p>b. Penerapan Tata Kelola telah dilakukan secara berkelanjutan dan menerapkan prudentialbanking dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis</p> <p>c. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan oleh OJK yang direkomendasikan</p>			

kepada Dewan Komisaris BPR berdasarkan hasil exit meeting dengan Dewan Komisaris.
d. Telah melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap kejadian yang berdampak signifikan bagi BPR khususnya selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2022
e. Tingkat kesehatan bank telah dipertahankan dalam posisi sehat
f. Monitoring secara ketat dan selektif dalam pemberian kredit terhadap debitur yang terdampak Covid 19

Penjelasan Lebih Lanjut :

BPR Akasia Mas yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 miliar boleh hanya memiliki 2 (dua) Direksi, dengan syarat salah satu Direksinya wajib menjalankan fungsi kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Johnny Laurenz Tamarindang
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) serta sistem pengendalian internal yang efektif dalam setiap kegiatan usaha dan operasional BPR. d. Berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, pemeriksaan OJK, Audit Eksternal/KAP, dan pengawas otoritas lainnya. e. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit, serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku</p>			
2.	Nama	:	Wong Budi Setiawan
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha dan operasional BPR. d. Berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, pemeriksaan OJK, Audit Eksternal/KAP, dan pengawas otoritas lainnya. e. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit, serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</p>			
Rekomendasi Kepada Direksi :			

- a. Menindaklanjuti setiap hasil keputusan RUPS Tahunan yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan dan operasional BPR.
- b. Melaksanakan penerapan tata kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Resiko yang efektif dalam kegiatan operasional dan bisnis
- c. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan oleh OJK yang direkomendasikan kepada Dewan Komisaris BPR berdasarkan hasil exit meeting dengan Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direktur atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Meningat modal inti BPR belum mencapai Rp80 miliar, maka Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk komite-komite, seperti: Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
tidak ada			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus, SE,MM		Rp0	0%
2.	Anwar Musadad, SH		Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Direksi pada BPR Akasia Mas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Akasia Mas				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus, SE,MM		-	-	0%
2.	Anwar Musadad, SH		-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham BPR lain dan pada perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus, SE,MM		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Anwar Musadad, SH		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keuangan anggota direksi pada BPR tidak ada					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus, SE,MM		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Anwar Musadad, SH		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga pada PT BPR Akasia Mas					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Johnny LaurenzTamarindang		Rp0	0%
2.	Wong Budi Setiawan		Rp8.500.000.000	85%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Daftar nama kepemilikan saham setelah RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juli 2022				
1. Ir Wong Budi Setiawan dengan 170.000 lembar saham persentase 85 %				
2. Clara D Viriya dengan 20.000 lembar saham persentase 10 %				
3. Liknawaty K dengan 10.000 lembar saham persentas 5 %				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wong Budi Setiawan		602591	PT BPR Karya Bakti Sejahtera	20%
2.	Wong Budi Setiawan		-	PT Fintech Bina Bangsa	24%
3.	Wong Budi Setiawan		-	PT Akasia Mas Investama	9.8%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain sudah diketahui dalam RUPS					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wong Budi Setiawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wong Budi Setiawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp1.363.200.000	2	Rp360.200.000
2.	Tunjangan	2	Rp248.900.000	2	Rp33.900.000
3.	Tantiem	2	Rp137.600.000	2	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.749.700.000		Rp394.100.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tunjangan tunai (2)	mobil operasional (2)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (1), Asuransi Rawat Inap Manulife (1)	Asuransi Rawat Inap Manulife (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan pulsa (1)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
untuk tunjangan transportasi dan telepon bagi Direksi dibayarkan setiap bulan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.69 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.09 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.14 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.96 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.89 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji (pokok) tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan (dalam 1 tahun)	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Januari 2023	2	Arah Kebijakan BPR Akasia Mas pada tahun 2023
2.	27 Maret 2023	2	Strategi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
3.	13 Juni 2023	2	Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum OJK tahun 2023
4.	03 September 2023	2	Kinerja Keuangan berdasarkan indikator rasio kinerja BPR triwulan 3 tahun 2023
5.	08 Desember 2023	2	Persiapan EOM 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pada tahun 2023 Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 5(lima) kali, dan diselenggarakan secara tatap muka di Kantor Pusat BPR Akasia Mas			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		3	0	75%
2.	Wong Budi Setiawan		4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Untuk pelaksanaan rapat komisaris selama tahun 2022 selalu dihadiri oleh anggotakomisaris , dan berlangsung pada Kantor Pusat BPR Akasia Mas					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Pada tahun 2023, jumlah penyimpangan internal pada BPR Akasia Mas yang dilakukan Pegawai Tetap sebanyak 1(satu) kejadian dan telah diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan sanksi pemecatan kepada pegawai ybs.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	1
Total	2	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Dalam tahun 2023 ada dua nasabah dari kantor Cabang Bekasi yang mengugat BPR Akasia Mas terkait kredit yang diberikan secara ketentuan dan prosedur internal sudah sesuai kebijakan perkreditan BPR, debitur tidak mau memenuhi kewajibannya sudah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi debitur tetap menempuh jalur hukum		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Pada tahun 2023 tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 April 2023	Sosial	Pemberian santunan dan bingkisan dalam perayaan Idul Fitri 1444 anak-anak panti asuhan	Panti Asuhan Clater Serpong	Rp5.000.000
2.	18 Agustus 2023	Sosial	partisipasi BPR Akasia Mas kegiatan CSR penyelenggaraan Nikah Massal dalam rangka HUT RI ke 78	Pemkot Tangerang Selatan (Kemenag)	Rp7.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

Pemberian santunan dan bingkisan dalam perayaan Idul Fitri anak-anak panti asuhan pada tahun 2023 dan kegiatan nikah massal yang diselenggarakan oleh Pemkot Tangsel sebagai salah satu bentuk CSR

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Akasia Mas Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020.
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR Akasia Mas selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik senantiasa dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tangerang Selatan 31 Januari 2024

BPR Akasia Mas
Menyetujui



Agus, SE MM
Direktur Utama



Johnny L. Tamarindang
Komisaris Utama